

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA
AER BALE KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS
SUMATERA UTARA TAHUN 2023-2024**

Oleh: Ummu Salamah Hasibuan
Pembimbing: Sofyan Hadi S.Sos., M.Si.
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aer Bale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2023–2024, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Latar belakang penelitian ini didasari oleh permasalahan pendataan penerima bantuan yang kurang akurat, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah desa, pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat (KPM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PKH di desa Aer Bale telah membantu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan publik, meskipun efektivitasnya masih terkendala oleh masalah teknis dan administratif. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi dukungan regulasi yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi lintas lembaga. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan sistem pendataan, peningkatan jumlah pendamping, dan penguatan koordinasi antar pihak terkait.

Kata Kunci : Strategi Program, Menetapkan Standard Program, Menyusun SOP Program, Outfut Program, Infut Program.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Aer Bale Village, Sosa District, Padang Lawas Regency, during 2023– 2024, and identifies the supporting and inhibiting factors in its implementation. PKH is a

conditional social assistance program designed to improve the quality of human resources through access to education, health, and social welfare for low-income families. The background of this study is based on issues such as inaccurate data collection of beneficiaries, limited number of facilitators, and the presence of hard-to-reach areas.

The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving informants from the village government, PKH facilitators, and beneficiary families (KPM).

The results show that, in general, the implementation of PKH in Aer Bale Village has helped improve access to public services for low-income communities, although its effectiveness is still hampered by technical and administrative issues. Supporting factors include clear regulatory frameworks, active community participation, and cross-agency coordination. To enhance its effectiveness, improvements in the data collection system, an increase in the number of facilitators, and stronger coordination among relevant stakeholders are recommended.

Keywords: Program Strategy, Establishing Program Standards, Developing Program SOP (Standard Operating Procedures), Program Output, Program Input.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar yang menghambat pembangunan nasional. Di Kabupaten Padang Lawas, angka kemiskinan pada 2023–2024 menunjukkan peningkatan, termasuk di Desa Aer Bale. Hal ini mengindikasi perlunya intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan bersyarat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Namun, berdasarkan observasi awal, implementasi PKH di Desa Aer Bale masih menghadapi sejumlah kendala seperti pendataan tidak akurat, ketidaktepatan sasaran, dan minimnya tenaga pendamping. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana PKH dilaksanakan di Desa Aer Bale

dan apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. metro Pekanbaru (TMP) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dibidang angkutan umum. Pada era globalisasi perkembangan teknologi semakin menuntut manusia untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Penerapan sistem Transaksi Non Tunai merupakan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pembayaran di bidang pemerintahan. Pemerintah kota pekanbaru telah menerapkan kebijakan pembayaran non tunai pada bus Trans metro yang sebelumnya menggunakan tiket kertas beralih ke pembayaran elektronik. Kebijakan pembayaran non tunai ini diberlakukan sejak 16 Juni 2023 berdasarkan Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Transmetro Pekanbaru.

Secara umum, implementasi PKH di Desa Aer Bale telah memberikan dampak positif terutama pada peningkatan akses pendidikan bagi anak sekolah dan layanan kesehatan ibu dan balita. Namun outcome jangka panjang seperti kemandirian ekonomi dan perubahan perilaku belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan jumlah pendamping, perbaikan sistem pendataan, serta edukasi berkelanjutan kepada KPM untuk memastikan keberhasilan PKH di masa mendatang.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023–2024?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023–2024.

TINJAUAN TEORI

Implementasi program merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dengan matang tidak akan memberikan dampak apa pun apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok

yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Proses implementasi melibatkan interaksi antara berbagai variabel seperti standar pelaksanaan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat.

Sementara menurut George C. Edwards III (yang paling banyak dipakai dalam penelitian implementasi program), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun dalam pengembangan teori dan penerapan pada konteks program pemerintah seperti PKH, Edwards juga menegaskan bahwa implementasi dapat dianalisis melalui lima komponen besar:

1. Strategi Program
2. Penetapan Standar & Indikator Kinerja
3. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)
4. Output Program
5. Outcome Program

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah perosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, menurut Sugiono(2011) Syaodih Nana mengatakan metode kualitatif merupakan cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dengan pendamping PKH, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan KPM. Mengamati langsung proses penyaluran bantuan, pendataan, dan pemenuhan komitmen, mengumpulkan arsip terkait PKH, DTKS, serta laporan pendamping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dianalisis melalui lima komponen implementasi program yang mengacu pada teori George C. Edwards. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi telah berlangsung, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan teknis maupun non-teknis. Pembahasan di bawah ini menjelaskan kondisi riil secara lebih mendalam.

1. Strategi Program

Strategi program merupakan acuan awal dalam pelaksanaan PKH. Di Desa Aer Bale, strategi yang disusun oleh pendamping PKH bersama pemerintah desa meliputi:

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait tujuan, manfaat, persyaratan, dan kewajiban penerima bantuan.
2. Pendataan dan verval lapangan yang dilakukan sebelum penetapan penerima manfaat.
3. Koordinasi rutin antara pendamping PKH dan perangkat desa.
4. Pertemuan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) untuk meningkatkan pengetahuan KPM.

5. Pendekatan persuasif untuk mendorong kesadaran KPM memenuhi komitmen.

Namun strategi tersebut belum berjalan optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa KPM masih merasa “bingung” atau tidak memahami sepenuhnya konsep bantuan bersyarat. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kehadiran anak di sekolah, serta masih adanya ibu hamil yang tidak rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan pendamping baru menjangkau sebagian kelompok, terutama rumah tangga yang mudah dijangkau secara geografis. Penduduk yang tinggal jauh dari pusat desa cenderung kurang mendapat informasi karena keterbatasan sarana transportasi pendamping.

2. Penetapan Standar Program

Standar PKH yang ditetapkan pemerintah menekankan pemenuhan komitmen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun berdasarkan hasil penelitian, standar ini belum sepenuhnya diterapkan di Desa Aer Bale.

a. Standar Pendidikan

- Anak harus bersekolah sesuai jenjang pendidikan.
- Kehadiran minimal 85% per semester.

Dalam praktiknya, masih banyak anak dari keluarga KPM yang tidak hadir secara rutin karena alasan ekonomi, jauh dari sekolah, kurangnya motivasi belajar, atau keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga seperti berkebun.

b. Standar Kesehatan

- Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan minimal empat kali,

balita wajib mengikuti imunisasi dan penimbangan, anak usia sekolah wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan. Tetapi di lapangan ditemukan bahwa beberapa ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan secara rutin. Alasannya bervariasi, mulai dari jarak ke puskesmas, tidak adanya ongkos transportasi, hingga ketidaktahuan akan pentingnya pemeriksaan kehamilan.

c. Standar Kesejahteraan Sosial

- Lansia dan disabilitas berat harus mendapatkan pendampingan rutin. Perubahan perilaku sosial harus terlihat dalam jangka panjang.

Kendala muncul karena pendamping kesulitan menjangkau penerima manfaat lansia yang tinggal jauh dan tidak memiliki akses transportasi. Dengan demikian, standar yang ditetapkan program belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial di masyarakat.

3. Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Program

SOP yang ditetapkan pemerintah mengatur proses penyaluran bantuan, pendataan, verval, monitoring, dan evaluasi. Tetapi di Desa Aer Bale, pelaksanaan SOP tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

a. SOP Penyaluran Bantuan

Secara ideal, bantuan PKH disalurkan melalui rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Namun masalah muncul, Letak mesin ATM sangat jauh dari desa, bahkan ada KPM yang harus menempuh jarak 15–20 km. Jaringan bank sering bermasalah sehingga dana tidak bisa ditarik tepat waktu. Ada KPM yang tidak dapat menggunakan ATM dan harus meminta bantuan

orang lain. Akibatnya, beberapa keluarga menerima bantuan terlambat, sementara yang lain harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, sehingga manfaat bantuan berkurang.

SOP mengharuskan pendamping melakukan kunjungan rutin ke rumah KPM, memantau perubahan perilaku, dan mengisi laporan di aplikasi e-PKH. Tetapi pendamping PKH di Kecamatan Sosa menangani lebih dari satu desa sehingga, Pendamping tidak memiliki waktu memadai untuk mengunjungi seluruh KPM, laporan verval sering tertunda karena jaringan internet terbatas. P2K2 tidak dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Kondisi ini menyebabkan SOP tidak berjalan konsisten.

4. Output Program

Output merupakan hasil jangka pendek. Berdasarkan penelitian, output PKH di Desa Aer Bale terlihat dalam bentuk, Akses Pendidikan Meningkat, Sebagian anak penerima PKH kini lebih rutin bersekolah dibandingkan sebelum menerima bantuan. Orang tua mulai menyadari bahwa pendidikan penting untuk masa depan anak. Peningkatan Kunjungan Posyandu. KPM lebih sering membawa balita ke posyandu untuk penimbangan dan imunisasi meskipun belum merata, Beban Ekonomi Berkurang Bantuan tunai sangat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli beras, perlengkapan sekolah, dan biaya transportasi anak. Namun output tersebut masih terbatas dan tidak merata. Masih banyak keluarga yang belum mengalami perubahan

signifikan karena kurangnya pendampingan.

5. Outcome Program

Outcome adalah dampak jangka panjang yang bersifat lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, outcome PKH di Desa Aer Bale belum maksimal. Perubahan Perilaku Masih Lemah Beberapa keluarga belum memahami PHK sebagai program bersyarat, sehingga pemenuhan komitmen dianggap tidak penting. Kemandirian Ekonomi Belum Terwujud. Program PKH belum mampu mendorong keluarga keluar dari garis kemiskinan secara signifikan. Bantuan masih digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, bukan sebagai modal produktif. Ketergantungan Tinggi. Banyak keluarga berharap bantuan terus berlanjut. Ketergantungan ini disebabkan tidak adanya program lanjutan yang memberikan pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. Belum Terjadi Perubahan Sosial yang Merata. PKH belum sepenuhnya mengubah pola pikir keluarga mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, outcome jangka panjang belum tercapai secara optimal karena faktor struktural dan kultural masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum berjalan efektif dan

belum mampu mencapai tujuan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Secara umum, implementasi PKH di Desa Aer Bale masih menghadapi berbagai hambatan di hampir seluruh aspek pelaksanaan. Hal ini tampak dari lemahnya strategi program, ketidaktepatan sasaran, tidak terpenuhinya standar, pelaksanaan SOP yang tidak optimal, serta belum tercapainya output dan outcome program secara maksimal. Pertama, strategi pelaksanaan program tidak diterapkan secara optimal. Sosialisasi yang seharusnya menjadi fondasi pemahaman masyarakat tidak terlaksana secara menyeluruh. Banyak KPM tidak memahami kewajiban pemenuhan komitmen terkait pendidikan dan kesehatan. Proses pendataan juga tidak dilakukan secara efektif sehingga banyak kesalahan dalam penetapan penerima manfaat. Keterbatasan pendamping dalam menjangkau seluruh wilayah desa turut memperburuk efektivitas strategi yang telah disusun.

Secara keseluruhan, implementasi PKH di Desa Aer Bale dapat dikategorikan belum efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hambatan terbesar berasal dari ketidakakuratan data, keterbatasan pendamping, rendahnya pemahaman KPM, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem pendataan, penambahan pendamping, peningkatan kualitas sosialisasi, serta penguatan mekanisme pengawasan

agar tujuan utama PKH dapat tercapai pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, Amru. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara).
- Media. As'ari, M. H. (2019). Model Implementasi Program CSR di Indonesia. Pekanbaru: Gramedia.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Pertama). CV Syakir Media Press.
- Chen, H. T., & Rossi, P. H. (2020). The Role of Standards in Program Evaluation. Evaluation and Program Planning.
- Syamsul Bahri, M. (2020). Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu. Jakarta: Whidina Bhakti Persada Bandung.
- Kunc, M., & Morecroft, J. (2019). Strategic Management: A Systematic Approach. Journal of Business Research.
- McDavid, J. C., & Hawthorn, L. R. (2019). Program Evaluation and Performance Measurement.
- Labolo, Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan Kelima). Alfabeta.
- Jurnal / Skripsi**
- Afebrianti, F. (2022). Bantuan Sosial UMKM terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Duri Kabupaten Bengkalis. Media.
- Akhyar, M. F. (2020). Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumber Sari Kabupaten Rembang Tahun 2020.
- Wardani, D. T. R. S., & J. (2020). Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Holistik.
- Hatry, H. P. (2019). Performance Measurement: Getting Results (2nd ed.). Washington, DC: The Urban Institute Press.
- Lisa Agustin, H. S. (2022). Pengaruh Pengangguran, IPM, dan Bantuan Sosial... (Data skripsi tidak lengkap pada file).
- Fitri Khoerunisa, Ansori, & Novi Widiastuti. (2023). Dampak Program Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero. (Studi Terdahulu).
- Diyah Tri Rezki Setyawardani. (2020). Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Wanea Kota Manado.
- Ariska Suryanti. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar.
- Ridha Fitri Amelia. (2022). Dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kelurahan Paniggilan Utara Kota Tangerang.
- Muamil Sun'an, Amran Husein, Moh. Amrul Badal. (2021). Analisis Dampak Bantuan Sosial terhadap

Kemiskinan di Kabupaten
Taliabu.